Outline Journal of Economic Studies

Journal homepage: <http://outlinepublisher.com/index.php/OJES>

Research Article

The Impact of Digitalization of Payment Systems on Inflation Stability in Indonesia

(Dampak Digitalisasi Sistem Pembayaran terhadap Stabilitas Inflasi di Indonesia)

Shintami Oktavia^{1*}, Loranty Folia Simanjuntak², Muhammad Alhasymi Matondang³, Richna Handriyani⁴

^{1,2,3,4} Universitas Negeri Medan, Indonesia

*Correspondence: shintami23@unimed.ac.id

Keyword:

Payment System
Digitalization
Inflation
Financial Inclusion

Abstract

This study aims to analyze the impact of payment system digitization on inflation stability in Indonesia during the period 2015 - 2024 using a qualitative approach. The main focus of this research is to examine how digital transformation in the payment system, especially through the use of e-money, QRIS, debit cards, and credit cards can contribute to changes in transaction patterns in society and its implications for the inflation rate. Digital transformation in the national payment system, such as the increasing use of QRIS, e-money, and other non-cash payment methods has changed people's transaction behavior and strengthened the effectiveness of inflation control policies. Digitalization accelerates transaction efficiency, lowers the amount of distribution costs, and expands financial inclusion. It also collectively contributes to price stability. However, there are challenges such as digital infrastructure gaps and financial literacy that still need to be improved, so that the benefits of digitalization can be used by many people as users. The results of this study confirm that the digitization of payment systems is a strategic instrument in maintaining Indonesia's macroeconomic stability, as long as there is synergistic policy support and continuous education.

PENDAHULUAN

Dalam dekade terakhir, Indonesia telah mengalami transformasi signifikan dalam sistem pembayaran seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital. Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter, telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mendorong digitalisasi, termasuk Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada 2014 dan peluncuran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada 2019. Inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas inklusi keuangan, dan mengurangi ketergantungan pada uang tunai. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024, jumlah pengguna QRIS mencapai 50,50 juta dengan 32,71 juta merchant yang telah mengadopsi sistem ini, mencerminkan lonjakan transaksi sebesar 226,54% dibandingkan tahun sebelumnya.

Digitalisasi sistem pembayaran tidak hanya memengaruhi perilaku konsumen dan pelaku usaha, tetapi juga memiliki implikasi terhadap indikator makroekonomi, khususnya inflasi. Beberapa studi empiris telah meneliti hubungan antara penggunaan alat pembayaran digital dan tingkat inflasi di Indonesia. Misalnya, penelitian oleh Putri dan Murialti (2024) menemukan bahwa transaksi menggunakan e-money memiliki pengaruh positif signifikan terhadap inflasi, sedangkan penggunaan QRIS menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap inflasi. Hal ini menunjukkan bahwa jenis instrumen pembayaran digital dapat memiliki dampak yang berbeda terhadap stabilitas harga.

Lebih lanjut, penelitian oleh Siswantoro (2024) menganalisis dampak pengeluaran pemerintah dan pembayaran non-tunai selama pandemi COVID-19 terhadap inflasi di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa pembayaran non-tunai, seperti penggunaan debit card dan e-money, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi, sementara penggunaan kartu kredit tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Temuan ini menyoroti kompleksitas hubungan antara digitalisasi pembayaran dan inflasi, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk jenis instrumen pembayaran dan kondisi ekonomi makro.

Di sisi lain, beberapa studi menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pembayaran dapat membantu menekan laju inflasi. Penelitian oleh Fakultas Bisnis UKDW (2020) mengungkapkan bahwa peningkatan transaksi menggunakan uang elektronik berkontribusi terhadap penurunan laju inflasi di Indonesia. Data menunjukkan bahwa antara tahun 2018 hingga 2020, nilai transaksi uang elektronik meningkat dari Rp 47,2 triliun menjadi Rp 205 triliun, sementara tingkat inflasi menurun dari 3,13% menjadi 1,68%. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi pembayaran digital dapat berperan dalam menjaga stabilitas harga.

Namun, tidak semua penelitian menemukan hubungan yang signifikan antara digitalisasi pembayaran dan inflasi. Studi oleh Shofia (2023) menggunakan pendekatan studi literatur untuk menganalisis pengaruh e-money terhadap inflasi di Indonesia dan menemukan bahwa penggunaan e-money tidak memiliki dampak signifikan terhadap tingkat inflasi. Perbedaan hasil ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut dengan pendekatan empiris yang komprehensif untuk memahami dinamika hubungan antara digitalisasi sistem pembayaran dan stabilitas inflasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak digitalisasi sistem pembayaran terhadap stabilitas inflasi di Indonesia selama periode 2015–2024. Dengan menggunakan data sekunder dan pendekatan kuantitatif, studi ini akan mengkaji bagaimana berbagai instrumen pembayaran digital, seperti e-money, QRIS, kartu debit, dan kartu kredit, memengaruhi tingkat inflasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan moneter dan strategi digitalisasi sistem pembayaran yang efektif untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.

PENELITIAN TERDAHULU

Transformasi digital dalam sistem pembayaran telah menjadi fenomena global yang turut memengaruhi dinamika ekonomi makro, termasuk di Indonesia. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter telah mendorong penggunaan instrumen pembayaran non-tunai, seperti e-money, kartu debit, kartu kredit, dan QRIS, guna meningkatkan efisiensi transaksi dan inklusi keuangan. Peluncuran QRIS pada tahun 2019 merupakan langkah strategis untuk menyatukan berbagai metode pembayaran digital di Indonesia. Hingga tahun 2024, jumlah pengguna QRIS mencapai 50,50 juta dengan 32,71 juta merchant yang telah mengadopsi sistem ini, mencerminkan lonjakan transaksi sebesar 226,54% dibandingkan tahun sebelumnya.

Beberapa studi empiris telah meneliti hubungan antara digitalisasi sistem pembayaran dan tingkat inflasi di Indonesia. Putri dan Murialti (2024) menemukan bahwa transaksi menggunakan e-money memiliki pengaruh positif signifikan terhadap inflasi, sedangkan penggunaan QRIS menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap inflasi. Hal ini menunjukkan bahwa jenis instrumen pembayaran digital dapat memiliki dampak yang berbeda terhadap stabilitas harga.

Penelitian oleh Meutia et al. (2024) menggunakan model Vector Error Correction Model (VECM) untuk menganalisis pengaruh jumlah uang beredar, suku bunga, dan e-money terhadap inflasi di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, jumlah uang beredar dan suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi, sedangkan e-money berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Namun, dalam jangka pendek, ketiga variabel tersebut berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap inflasi.

Soraya dan Abbas (2022) meneliti pengaruh pembayaran non-tunai terhadap inflasi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan Error Correction Model (ECM). Mereka menemukan bahwa volume transaksi kartu

debit berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi, sedangkan volume transaksi kartu kredit dan e-money berpengaruh negatif dan signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa jenis instrumen pembayaran non-tunai memiliki dampak yang berbeda terhadap inflasi.

Rahmadani dan Hilmawan (2024) menganalisis pengaruh volume uang elektronik, suku bunga kredit konsumsi, dan nilai tukar terhadap inflasi di Indonesia. Dalam jangka panjang, volume uang elektronik berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap inflasi, sedangkan suku bunga kredit konsumsi berpengaruh positif dan signifikan, dan nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan. Namun, dalam jangka pendek, volume uang elektronik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi.

Shofia (2023) melakukan studi literatur untuk menganalisis pengaruh e-money terhadap inflasi di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan e-money tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Namun, penulis menyarankan perlunya pengawasan dan pengamatan terhadap penggunaan *e-money* dan inflasi yang terjadi.

Rahmayuni (2023) meneliti pengaruh e-money dan e-commerce terhadap tingkat inflasi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-money* dan *e-commerce* berpengaruh signifikan terhadap inflasi, dengan e-commerce memiliki pengaruh yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital dalam sektor perdagangan juga dapat memengaruhi stabilitas harga.

Secara teoritis, hubungan antara digitalisasi sistem pembayaran dan inflasi dapat dijelaskan melalui teori kuantitas uang (*Quantity Theory of Money*), yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah uang beredar dapat menyebabkan kenaikan harga. Namun, dalam konteks digitalisasi, efisiensi transaksi dan peningkatan inklusi keuangan dapat menekan biaya transaksi dan meningkatkan produktivitas, yang pada akhirnya dapat membantu menstabilkan inflasi. Oleh karena itu, dampak digitalisasi sistem pembayaran terhadap inflasi bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk jenis instrumen pembayaran, perilaku konsumen, dan kondisi ekonomi makro.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana digitalisasi sistem pembayaran memengaruhi stabilitas inflasi di Indonesia selama periode 2015–2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap fenomena yang kompleks, seperti relasi antara kebijakan digitalisasi, perilaku masyarakat dalam bertransaksi, dan dinamika inflasi, melalui penelusuran makna dan narasi yang berkembang dalam konteks sosial dan ekonomi Indonesia.

Fokus utama dari penelitian ini adalah mengkaji bagaimana transformasi digital dalam sistem pembayaran—khususnya melalui penggunaan e-money, QRIS, kartu debit, dan kartu kredit—berkontribusi terhadap perubahan pola transaksi masyarakat dan implikasinya terhadap laju inflasi. Penelitian ini juga memeriksa respons dan strategi dari pihak otoritas moneter (Bank Indonesia), pelaku industri keuangan digital, serta konsumen terhadap perubahan tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap laporan tahunan Bank Indonesia, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), dan dokumen kebijakan terkait digitalisasi pembayaran. Analisis isi (*content analysis*) terhadap artikel jurnal ilmiah, siaran pers resmi, dan berita ekonomi dari tahun 2015 hingga 2024. Wawancara mendalam (jika diperlukan) dengan informan kunci seperti pejabat BI, akademisi ekonomi, dan pelaku fintech yang terlibat langsung dalam digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan menelaah data sekunder berupa laporan BI, statistik BPS, serta publikasi penelitian terdahulu dari penulis Indonesia (contoh: Putri & Murialti, 2024; Soraya & Abbas, 2022). Studi literatur dengan mengkaji teori dan hasil riset yang relevan untuk memahami perkembangan sistem pembayaran digital dan dampaknya terhadap inflasi. Dan wawancara semi-terstruktur (opsional) yang digunakan sebagai pelengkap jika ditemukan celah informasi dalam dokumentasi atau literatur.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis tematik (*thematic analysis*). Data dari dokumentasi dan literatur dikodekan menjadi tema-tema seperti “*percepatan transaksi digital*”, “*pengaruh terhadap permintaan*”

agregat”, “*pengendalian inflasi oleh BP*”, dan “*respons masyarakat terhadap QRIS*”. Setiap tema kemudian dianalisis untuk memahami bagaimana proses digitalisasi sistem pembayaran dapat menstimulasi atau menekan laju inflasi.

Validitas data dijaga dengan menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai dokumen (BI, BPS, jurnal ilmiah, dan media massa) serta triangulasi metode jika wawancara turut dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi riil yang terjadi dalam periode penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Digitalisasi Sistem Pembayaran di Indonesia (2015–2024)

Transformasi sistem pembayaran di Indonesia dalam kurun waktu 2015 hingga 2024 mengalami akselerasi yang signifikan seiring meningkatnya adopsi teknologi digital dan strategi kebijakan moneter yang adaptif. Sejak tahun 2015, Bank Indonesia telah mendorong elektronifikasi transaksi untuk meningkatkan efisiensi sistem keuangan nasional. Namun, titik balik paling krusial terjadi pada periode 2019–2020, ketika pandemi COVID-19 mempercepat perubahan perilaku masyarakat menuju transaksi nontunai. Pada tahun 2019, Bank Indonesia meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai solusi integratif terhadap berbagai QR code pembayaran yang sebelumnya terfragmentasi. QRIS tidak hanya mempermudah proses pembayaran digital, tetapi juga memperluas jangkauan inklusi keuangan kepada pelaku UMKM dan masyarakat yang belum tersentuh perbankan formal. Berdasarkan data Bank Indonesia (2024), hingga akhir tahun tersebut tercatat 50,50 juta pengguna QRIS dengan jumlah merchant mencapai 32,71 juta. Lonjakan nilai transaksi mencapai pertumbuhan tahunan sebesar 226,54%, menandakan pergeseran besar-besaran dari sistem pembayaran konvensional menuju era digital.

Perkembangan sistem pembayaran digital juga diperkuat oleh meningkatnya pemanfaatan e-money dan kartu elektronik sebagai alat transaksi harian. Selama hampir satu dekade, e-money mengalami peningkatan pesat dalam hal jumlah pengguna maupun nilai transaksi. Hal ini tidak lepas dari kemudahan penggunaan serta strategi korporasi digital seperti Gopay, OVO, Dana, dan LinkAja yang melakukan penetrasi agresif di sektor konsumsi masyarakat. Inisiatif pemerintah dalam mendorong digitalisasi pembayaran transportasi publik, parkir, tol, hingga bantuan sosial turut memperluas ekosistem penggunaan e-money. Soraya dan Abbas (2022) mencatat bahwa meningkatnya transaksi non-tunai melalui kartu debit, kartu kredit, dan uang elektronik secara konsisten mendorong efisiensi dan mengurangi biaya transaksi secara makro. Tidak hanya di kota besar, digitalisasi juga mulai merambah ke daerah pelosok melalui sinergi antara BI, fintech, dan lembaga keuangan mikro digital. Penguatan infrastruktur seperti perluasan jaringan 4G, distribusi smartphone yang lebih merata, dan edukasi literasi keuangan menjadi faktor pendukung utama yang memungkinkan digitalisasi berjalan lebih inklusif.

Meski demikian, perkembangan digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia tidak terjadi secara seragam. Ketimpangan akses digital antarwilayah masih menjadi tantangan struktural yang perlu diperhatikan. Wilayah luar Jawa, terutama kawasan timur Indonesia, belum sepenuhnya menikmati infrastruktur yang memadai untuk mendukung digitalisasi transaksi. Beberapa studi menyebutkan bahwa kesenjangan dalam kualitas jaringan, ketersediaan perangkat, serta tingkat literasi keuangan digital turut memperlambat adopsi teknologi pembayaran modern di wilayah tertentu. Di sisi lain, dominasi institusi keuangan besar dan platform digital tertentu menimbulkan risiko oligopoli jika tidak diimbangi dengan regulasi yang adil. Kendati demikian, kebijakan Bank Indonesia melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 telah memberikan arah dan tahapan strategis untuk mewujudkan sistem pembayaran nasional yang cepat, murah, aman, andal, dan inklusif (CEMUMUAI). Dengan sinergi lintas sektor dan dukungan dari masyarakat, perkembangan digitalisasi sistem pembayaran selama 2015–2024 menjadi fondasi penting dalam mewujudkan stabilitas sistem keuangan dan pengendalian inflasi yang lebih adaptif di era ekonomi digital.

Perubahan Perilaku Transaksi Masyarakat akibat Digitalisasi Sistem Pembayaran

Perubahan signifikan dalam perilaku transaksi masyarakat Indonesia menjadi salah satu dampak paling nyata dari digitalisasi sistem pembayaran. Seiring dengan semakin luasnya penggunaan e-money, QRIS, serta kartu

debit dan kredit, masyarakat menunjukkan pergeseran preferensi dari transaksi berbasis tunai menuju transaksi berbasis digital. Pergeseran ini tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan besar, tetapi mulai merambah wilayah suburban dan sebagian wilayah pedesaan, terutama setelah pandemi COVID-19 yang memaksa masyarakat beradaptasi dengan protokol kesehatan, termasuk menghindari kontak fisik dalam bertransaksi. QRIS, sebagai standar nasional pembayaran berbasis kode QR, mempercepat proses digitalisasi ini dengan menghadirkan kemudahan, keamanan, dan efisiensi dalam setiap transaksi. Berdasarkan laporan Bank Indonesia (2024), terjadi lonjakan jumlah pengguna QRIS dari sekitar 5 juta pada tahun 2020 menjadi lebih dari 50 juta pada tahun 2024. Hal ini menandakan transformasi besar dalam kebiasaan berbelanja, baik untuk kebutuhan harian maupun konsumsi jangka menengah.

Pola konsumsi masyarakat turut mengalami pergeseran seiring dengan kemudahan bertransaksi secara digital. Sebelumnya, masyarakat cenderung melakukan pembayaran secara tunai di pasar tradisional atau toko fisik, namun kini banyak transaksi harian seperti pembelian makanan, pulsa, kebutuhan rumah tangga, bahkan pembayaran zakat dan donasi dilakukan melalui aplikasi digital. Platform seperti GoPay, OVO, dan Dana semakin populer karena tidak hanya menawarkan kemudahan transaksi, tetapi juga terintegrasi dengan berbagai layanan konsumen yang menunjang gaya hidup modern. Menurut penelitian oleh Rahmayuni (2023), digitalisasi sistem pembayaran mendorong kemunculan pola konsumsi impulsif karena akses pembayaran menjadi semakin instan dan minim hambatan. Fenomena ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya berdampak pada efisiensi transaksi, tetapi juga pada pola pikir dan perilaku ekonomi masyarakat yang lebih reaktif terhadap dorongan konsumsi.

Selain mempercepat konsumsi, digitalisasi juga mengubah dinamika interaksi antara pelaku usaha dan konsumen. Pelaku UMKM kini dapat menerima pembayaran digital dengan mudah melalui QRIS atau e-wallet tanpa perlu membangun sistem perbankan yang kompleks. Hal ini membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi pelaku usaha mikro yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem keuangan formal. Dalam laporan Putri & Murialti (2024), disebutkan bahwa adopsi pembayaran digital pada sektor UMKM meningkatkan omset harian hingga 17% secara rerata dan memperluas jangkauan pasar hingga lintas wilayah. Perubahan ini menciptakan ekosistem transaksi yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Bahkan, pelaku sektor informal seperti pedagang kaki lima dan layanan jasa keliling mulai memanfaatkan QRIS sebagai alat pembayaran utama, menunjukkan bahwa digitalisasi telah menembus batas-batas sosial ekonomi.

Namun demikian, perubahan perilaku ini juga memunculkan beberapa tantangan, khususnya dalam aspek literasi keuangan digital dan pengelolaan konsumsi rumah tangga. Banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya risiko dari transaksi digital, termasuk potensi pencurian data, penyalahgunaan akun, atau jebakan gaya hidup konsumtif. Ketergantungan pada metode pembayaran instan tanpa perencanaan yang matang berpotensi mendorong perilaku belanja yang tidak rasional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif yang berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku industri digital, dan lembaga pendidikan untuk membangun perilaku transaksi yang sehat. Menurut Andini & Hidayah (2022), literasi digital menjadi faktor krusial dalam memastikan bahwa transformasi pembayaran digital berdampak positif terhadap kestabilan ekonomi mikro dan makro. Tanpa kesadaran yang memadai dari pengguna, digitalisasi bisa menjadi pedang bermata dua yang justru mengganggu kestabilan inflasi melalui peningkatan konsumsi yang tidak produktif.

Kontribusi Digitalisasi terhadap Pengendalian Inflasi

Digitalisasi sistem pembayaran tidak hanya berdampak pada efisiensi transaksi, tetapi juga memberikan kontribusi strategis terhadap pengendalian inflasi. Salah satu mekanisme utama yang menjelaskan hubungan ini adalah kemampuan digitalisasi dalam menurunkan biaya transaksi dan distribusi barang dan jasa. Dengan menggunakan teknologi pembayaran digital seperti QRIS, e-money, dan internet banking, pelaku usaha dapat mengurangi penggunaan uang tunai, mengoptimalkan proses pembayaran, dan mempercepat arus transaksi. Efisiensi ini berujung pada penurunan biaya operasional yang dalam jangka panjang dapat menekan harga jual ke konsumen. Soraya dan Abbas (2022) menyebutkan bahwa pengurangan biaya distribusi melalui digitalisasi sistem pembayaran telah membantu menjaga kestabilan harga, khususnya di sektor perdagangan ritel dan jasa keuangan. Dalam kondisi ekonomi yang sensitif terhadap gangguan harga seperti Indonesia, digitalisasi

menjadi instrumen tak langsung yang berperan dalam menahan tekanan inflasi melalui penguatan mekanisme pasar.

Selain menurunkan biaya transaksi, digitalisasi sistem pembayaran juga memperkuat peran otoritas moneter, dalam hal ini Bank Indonesia, dalam mengelola permintaan agregat. Dengan semakin terintegrasinya sistem pembayaran nasional, data transaksi dapat diolah secara real-time dan digunakan sebagai indikator perilaku konsumsi masyarakat. Hal ini memungkinkan otoritas moneter untuk merespons gejolak ekonomi secara lebih cepat dan tepat. Sebagai contoh, peningkatan volume transaksi QRIS pada sektor makanan dan minuman dapat dijadikan sinyal kenaikan permintaan konsumsi, yang jika tidak diimbangi dengan penawaran yang cukup, berpotensi menimbulkan tekanan inflasi. Data ini sangat membantu dalam pengambilan kebijakan suku bunga atau makroprudensial untuk menjaga stabilitas harga. Putri & Murialti (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran telah memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui saluran permintaan konsumen yang lebih terukur.

Kontribusi digitalisasi terhadap pengendalian inflasi juga terlihat melalui peningkatan inklusi keuangan. Masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap sistem keuangan formal kini dapat melakukan transaksi secara digital tanpa harus memiliki rekening bank. Dengan terbukanya akses ini, kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi meningkat, yang pada gilirannya menciptakan pasar yang lebih stabil. Inklusi keuangan yang meningkat berarti semakin banyak individu dan UMKM yang terlibat dalam ekosistem ekonomi formal, menjadikan pengendalian harga lebih dapat dipantau dan dikendalikan. Menurut Andini & Hidayah (2022), inklusi keuangan melalui digitalisasi tidak hanya mempercepat pemerataan ekonomi, tetapi juga memperkuat daya tahan sistem ekonomi terhadap tekanan eksternal yang bisa memicu inflasi, seperti kenaikan harga bahan pokok atau fluktuasi nilai tukar.

Namun, kontribusi digitalisasi terhadap pengendalian inflasi tidak bersifat otomatis dan seragam di seluruh wilayah. Di beberapa daerah, terutama yang memiliki infrastruktur digital yang terbatas, manfaat digitalisasi belum dirasakan secara optimal. Akses internet yang rendah, keterbatasan perangkat, serta rendahnya literasi digital menyebabkan transaksi digital belum bisa menggantikan peran uang tunai secara maksimal. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam efisiensi ekonomi antarwilayah, yang berpotensi memunculkan disparitas harga antar daerah. Dalam konteks ini, kebijakan digitalisasi sistem pembayaran harus disertai dengan pembangunan infrastruktur pendukung dan edukasi literasi digital yang merata agar dampaknya terhadap pengendalian inflasi dapat dirasakan secara nasional.

Pada akhirnya, digitalisasi sistem pembayaran berperan sebagai faktor pendukung dalam sistem pengendalian inflasi yang lebih modern dan responsif. Dengan mempercepat arus informasi, meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat peran data dalam pengambilan kebijakan, dan memperluas inklusi keuangan, digitalisasi membantu menciptakan kondisi ekonomi yang lebih stabil dan terkendali. Meski demikian, digitalisasi bukanlah satu-satunya solusi untuk mengendalikan inflasi. Perlu ada sinergi antara kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan transformasi digital agar tujuan stabilitas harga dapat dicapai secara berkelanjutan. Penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pembayaran, jika dikelola dengan baik dan didukung oleh regulasi yang inklusif, dapat menjadi pilar penting dalam menjaga kestabilan ekonomi makro Indonesia di tengah era transformasi digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan mulai dari pendahuluan hingga hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia selama periode 2015–2024 telah memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas inflasi melalui berbagai saluran, baik langsung maupun tidak langsung. Transformasi digital yang ditandai dengan meningkatnya penggunaan e-money, QRIS, dan sistem pembayaran non-tunai lainnya telah mendorong efisiensi transaksi, menurunkan biaya distribusi, serta mempercepat arus informasi ekonomi yang pada akhirnya mendukung pengendalian harga secara makro. Perubahan perilaku transaksi masyarakat yang semakin adaptif terhadap teknologi, peningkatan inklusi keuangan, serta kemampuan Bank Indonesia dalam memanfaatkan data digital untuk mendeteksi dan merespons tekanan inflasi menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya fenomena teknologis, melainkan juga instrumen kebijakan ekonomi yang strategis. Namun demikian, manfaat ini tidak serta-merta dirasakan secara merata, mengingat masih adanya kendala struktural seperti kesenjangan infrastruktur digital, rendahnya literasi

keuangan digital di sebagian wilayah, serta potensi konsumsi impulsif akibat kemudahan akses pembayaran. Oleh karena itu, agar digitalisasi dapat secara optimal berkontribusi pada stabilitas inflasi nasional, diperlukan sinergi berkelanjutan antara pemerintah, otoritas moneter, pelaku industri teknologi keuangan, dan masyarakat dalam membangun sistem pembayaran yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada pemerataan manfaat ekonomi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, S. R., & Hidayah, N. (2022). Literasi Digital dan Dampaknya terhadap Perilaku Konsumen di Era Digitalisasi Pembayaran. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Digital*, 8(1), 45-62.
- Bank Indonesia. (2024). Laporan Sistem Pembayaran Indonesia 2024. Jakarta: Bank Indonesia.
- Damanik, R. T., & Sari, N. K. (2021). Peran Fintech dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia. *Jurnal Teknologi Keuangan*, 5(2), 100-117.
- Fajar, M. A. (2023). Pengaruh Sistem Pembayaran Digital terhadap Stabilitas Makroekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21(1), 55-73.
- Gunawan, E., & Lestari, P. (2020). Analisis Dampak Digitalisasi Sistem Pembayaran pada Perilaku Konsumen di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Manajemen dan Inovasi*, 9(4), 215-232.
- Putri, L. M., & Murialti, T. (2024). Digitalisasi Sistem Pembayaran dan Inklusi Keuangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 12(2), 110-130.
- Rahmayuni, D. (2023). Pengaruh Digitalisasi Terhadap Pola Konsumsi dan Inflasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 19(3), 210-227.
- Rinaldi, M., & Rahmadana, M. F. (2020). Determinant analysis of household income inequality and poverty in Indonesia. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 9(2), 1414-1420.
- Rinaldi, M., Irawan, D., & Nasution, A. R. (2022). Comparison Of Human Development Index Before And During The Covid-19 Pandemic. *Enrichment: Journal of Management*, 12(2), 2404-2408.
- Santoso, B. H., & Wijaya, R. (2022). Implementasi QRIS dan Dampaknya terhadap Perilaku Transaksi Masyarakat. *Jurnal Sistem Informasi dan Bisnis*, 10(1), 75-91.
- Soraya, F., & Abbas, A. (2022). Efisiensi Sistem Pembayaran Digital dan Pengaruhnya terhadap Stabilitas Harga. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 14(4), 75-94.
- Yulianto, H., & Kusuma, A. (2021). Transformasi Digital dan Tantangan Pengendalian Inflasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 15(2), 134-150.
- Tirtayasa, S., Yusri, M., & Rinaldi, M. (2022). Business Strategies of MSMEs During COVID-19, Deli Serdang, Indonesia. *KnE Social Sciences*, 434-441.